

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **A. Desain Penelitian**

Menurut Sekaran (2014 : 152) desain penelitian meliputi serangkaian pilihan kegiatan pengambilan keputusan mengenai: (1) tujuan penelitian, apakah eksploratif, deskriptif, pengujian hipotesis, dll; (2) jenis penelitian; (3) tingkat intervensi penelitian; (4) horizon waktu; dan (5) unit analisis data. Berdasarkan pendapat di atas, penelitian yang dilakukan dirancang dengan menggunakan studi deskriptif melalui pendekatan kuantitatif.

Menurut Sekaran (2014 : 152) studi deskriptif adalah studi yang dilakukan untuk mengetahui dan menjelaskan karakteristik variabel yang diteliti dalam suatu situasi. Studi deskriptif memiliki fungsi untuk: (1) memahami karakteristik sebuah kelompok dalam situasi tertentu; (2) memikirkan secara sistematis mengenai berbagai aspek dalam situasi tertentu; (3) memberikan gagasan untuk penyelidikan dan penelitian lebih lanjut; (4) membuat keputusan sederhana.

Menurut Idrus (2009 : 29) metode penelitian kuantitatif adalah metode yang meyakini bahwa hukum-hukum tersebut dapat ditemukan dari data empiris dan menggunakan sampel yang dapat digunakan untuk melakukan generalisasi secara umum, selain itu metode kuantitatif dimaksudkan untuk melihat fenomena yang ada kemudian dibandingkan dengan teori yang dimiliki menggunakan instrumen untuk mengumpulkan data berupa angka untuk dioperasionalkan kemudian.

Jadi berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa desain penelitian yang penulis lakukan adalah Deskriptif Kuantitatif yang artinya menjelaskan karakteristik variabel yang diteliti dalam melihat fenomena yang ada kemudian dibandingkan dengan teori yang dimiliki menggunakan instrumen untuk mengumpulkan data berupa angka untuk dioperasionalkan kemudian.

## B. Operasionalisasi Variabel

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran daerah dengan kuantitas dan kualitas yang terukur, kemampuan daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Indikator dari kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan menggunakan rasio keuangan seperti rasio kemandirian keuangan daerah, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio aktivitas. Operasionalisasi variabel kinerja keuangan pemerintah daerah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. 1**  
**Operasionalisasi Variabel**

Variabel	Indikator	Formula
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	$\frac{PAD}{Pendapatan Transfer} \times 100\%$
	Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah	$\frac{Pendapatan Transfer}{Total Pendapatan Daerah} \times 100\%$
	Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal	$\frac{Total PAD}{Total Pendapatan Daerah} \times 100\%$
	Rasio Efektivitas	$\frac{Realisasi Penerimaan PAD}{Target Penerimaan PAD} \times 100\%$
	Rasio Efisiensi	$\frac{Realisasi Belanja Daerah}{Realisasi Pendapatan Daerah} \times 100\%$
	Rasio Aktivitas	$\frac{Total Belanja Pembangunan}{Total Belanja Daerah} \times 100\%$ $\frac{Total Belanja Rutin}{Total Belanja Daerah} \times 100\%$

### C. Sumber Data Penelitian

Sumber data menurut Zulfafrial (2012 : 46) adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Pengertian sumber data menurut Arikunto (2013 : 172) adalah Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sedangkan menurut Indriantoro dan Supomo (2013 : 142) sumber data adalah Sumber data merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data disamping jenis data yang telah dibuat di muka. Menurut Sugiyono (2009 : 225) bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Pada penelitian ini menggunakan sumber data sekunder.

Sumber data pada penelitian ini memiliki kriteria sebagai berikut :

1. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang mempublikasikan laporan keuangan tahunan pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang pada periode tahun 2008-2017.
2. Laporan keuangan yang memiliki kelengkapan data rasio yang diteliti.

Laporan keuangan pemerintah daerah terdiri atas laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan neraca, laporan operasional, laporan arus kas, dan laporan perubahan aktiva/ekuitas neto, serta catatan atas laporan keuangan. Berdasarkan jenis laporan pemerintah daerah tersebut, maka pada penelitian ini menggunakan laporan realisasi anggaran.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk melakukan pengumpulan data diperlukan teknik yang tepat guna memperoleh data yang objektif dari sumber data. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan melakukan pengamatan data sekunder karena data yang diperoleh tidak dihimpun secara langsung oleh peneliti, namun diperoleh dari pihak lain dan merupakan data yang sudah diolah. Menurut Bryman (2012 : 321) Analisis data sekunder adalah analisis data yang dilakukan oleh peneliti yang belum pernah terlibat dalam pengumpulan data, dengan tujuan untuk membatasi kemungkinan tanggung jawab atas data yang dikumpulkan. “Metode dokumentasi, peneliti dapat melakukan penyelidikan melalui benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan lain sebagainya” Arikunto (2006 : 158). Data dokumentasi meliputi catatan, korespondensi (termasuk *e-mail*), notulen rapat, laporan, catatan harian, transkrip pidato dan percakapan, catatan dan administrasi publik serta halaman *web*. Data penelitian ini diperoleh dari situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, dengan laman *www.djpk.go.id* berupa Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang pada tahun 2008-2017.

#### **E. Analisis Data**

Analisis data pada penelitian ini adalah menggunakan analisis deskriptif kuantitatif. Menurut Adhiantoko (2013 : 32) deskriptif kuantitatif yaitu melakukan perhitungan-perhitungan terhadap data keuangan yang diperoleh untuk memecahkan masalah yang ada sesuai dengan tujuan penelitian. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kuantitatif. Teknik analisis kuantitatif adalah dengan melakukan perhitungan-perhitungan terhadap data keuangan yang diperoleh untuk memecahkan masalah yang ada sesuai dengan tujuan penelitian. Berdasarkan permasalahan yang ada, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yaitu suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena yang berlangsung saat ini atau saat lampau. Penelitian ini menjelaskan gambaran secara umum fakta dan aktual

terhadap fenomena yang diteliti yaitu bidang Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang. Subjek dalam penelitian ini adalah Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, sedangkan objek pada penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Pandeglang tahun 2008 – 2017. Analisis data pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Melakukan Perhitungan Rasio Keuangan

a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Widodo (2001 : 262) rasio Kemandirian Keuangan Daerah ditunjukkan oleh besarnya Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan Pendapatan Daerah yang berasal dari sumber lain (Pendapatan Transfer) antara lain: Bagi hasil pajak, Bagi hasil bukan pajak sumber daya alam, Dana alokasi umum dan Alokasi khusus, Dana darurat dan pinjaman. Rumus yang digunakan untuk menghitung Rasio Kemandirian adalah:

$$RKKD = \frac{PAD}{Pendapatan Transfer} \times 100\%$$

**Tabel 3. 2**  
**Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah**

Kemampuan Keuangan	Kemandirian%	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0%-25%	Instruktif
Rendah	25%-50%	Konsultatif
Sedang	50%-75%	Partisipatif
Tinggi	75%-100%	Delegatif

Sumber: Halim (2007 : 169).

- 1) Pola hubungan instruktif, di mana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
- 2) Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.

- 3) Pola hubungan partisipatif, peranan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.
- 4) Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

b. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Menurut Hakim (2018 : 13) Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat atau pemerintah provinsi. Apabila rasio ini semakin tinggi maka sebagai salah satu tolak ukur kurangnya kemandirian keuangan pemerintah daerah dan kurangnya kemandirian pemerintah daerah dalam mengelola pembangunan daerahnya. Kriteria penilaian ketergantungan daerah dapat dilihat di tabel berikut ini:

**Tabel 3. 3**  
**Kriteria Penilaian Ketergantungan Keuangan Daerah**

<b>Presentase</b>	<b>Ketergantungan Keuangan Daerah</b>
0,00-10,00	Sangat Rendah
10,01-20,00	Rendah
20,01-30,00	Sedang
30,01-40,00	Cukup
40,01-50,00	Tinggi
>50,00	Sangat Tinggi

*Sumber: Halim (2007 : 169).*

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

c. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total Pendapatan Daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Derajat Desentralisasi Fiskal, khususnya komponen PAD dibandingkan dengan Total Pendapatan Daerah, menurut hasil penelitian Tim Fisipol UGM menggunakan skala interval seperti pada tabel berikut:

**Tabel 3. 4**  
**Skala Interval Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal**

<b>Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal (%)</b>	<b>Kemampuan Keuangan Daerah</b>
00,00–10,00	Sangat Kurang
10,01–20,00	Kurang
20,01–30,00	Cukup
30,01–40,00	Sedang
40,01–50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

*Sumber: Tim Litbang Depdagri, Fisipol UGM, 1991*

Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Derajat Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Total PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

d. Rasio Efektivitas

“Rasio efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah” Halim (2002 : 177)

Rumus untuk Rasio Efektivitas adalah:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

**Tabel 3. 5**  
**Kriteria Kinerja Efektivitas Keuangan**

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

*Sumber: Depdagri, Kepmendagri tahun 2002*

e. Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Semakin kecil Rasio Efisiensi Keuangan Daerah berarti Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah semakin baik. Untuk itu pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau tidak. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah:

$$REKD = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

**Tabel 3. 6**  
**Kriteria Kinerja Efisiensi Keuangan**

Persentase Kinerja Keuangan	Persentase Kinerja Keuangan
Di atas 100%	Tidak Efisien

Persentase Kinerja Keuangan	Persentase Kinerja Keuangan
90%-00%	Kurang Efisien
80%-90%	Cukup Efisien
60%-80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat Efisien

Sumber: Depdagri, Kemendagri tahun 2002

f. Rasio Aktivitas

Rasio yang mengukur antara alokasi dana belanja rutin (Belanja Tidak Langsung) dan belanja pembangunan (Belanja Langsung) secara optimal. Rasio Belanja Pembangunan ditunjukkan oleh total belanja Pembangunan dibandingkan dengan total dari APBD Semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk belanja pembangunan yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat akan semakin besar. Menurut Widodo (2001 : 262) secara sederhana rasio keserasian ini dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Pembangunan} = \frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Rutin} = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria pengukurannya dapat dilihat pada tabel 2.4 dibawah ini:

**Tabel 3. 7**  
**Skala Interval Rasio Belanja Pembangunan**

Persentase	Kategori
0,00-10,00	Sangat Kurang
10,01-20,00	Kurang
20,01-30,00	Cukup
30,01-40,00	Sedang
40,01-50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

*Sumber: Wulandari (2001 : 22).*

2. Menganalisa *Trend* Masing-Masing Rasio dari Tahun Pertama Periode Penelitian Sampai dengan Tahun Terakhir Periode Penelitian.

Menurut Mahmudi (2010 : 89) mendefinisikan analisis *trend* adalah analisis yang dilakukan untuk mengetahui kecenderungan baik berupa kenaikan atau penurunan kinerja selama kurun waktu tertentu. Sedangkan menurut Harahap (2010: 244) mendefinisikan analisis *trend* bertujuan untuk mengetahui tendensi atau kecenderungan keadaan keuangan suatu perusahaan di masa yang akan datang baik kecenderungan naik, turun maupun tetap. Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa analisis *trend* dalam kinerja keuangan adalah analisis yang berguna untuk mengetahui perkembangan kinerja keuangan dengan cara membandingkan rasio-rasio keuangan perusahaan dari tahun ke tahun.

Penyajian analisa *trend* menggunakan formula di Microsoft Word dan Microsoft Excel dengan cara:

- a. Membuka ribbon *chart* pada Microsoft Word.
- b. Memilih menu *chart line*.
- c. Memasuki tampilan Microsoft Excel.
- d. Mengubah format *category* menjadi tahun pengamatan penelitian.
- e. Mengubah format *series* menjadi rasio yang dipilih serta memasukkan standar ideal kriteria rasio.
- f. *Chart trend* rasio keuangan pada Microsoft Word tertampilkan.

Analisis dilakukan dari tahun pertama penelitian sampai tahun terakhir penelitian berdasarkan tampilan analisis *trend* pada tampilan di atas dengan melihat perkembangan rasio keuangan yang di analisis mengalami kenaikan rasio atau justru mengalami penurunan rasio keuangan. Analisis juga akan dilihat dari rata-rata rasio keuangan dalam kurun waktu sepuluh tahun (total periode pengamatan) lalu dibandingkan dengan standar ideal rasio kinerja keuangan pemerintahan.

3. Perbandingan Analisis *Trend* Tahun Analisis dengan Tahun Sebelumnya/Sesudahnya.

Dalam langkah ini, analisis dilakukan dengan cara membandingkan hasil rasio keuangan tahun yang dipilih dengan tahun sebelumnya atau sesudahnya dengan menggunakan *Time series* untuk analisa *trend* kinerja keuangan. Menurut Maryati (2010 : 129) menyatakan *trend* adalah suatu gerakan (kecenderungan) naik atau turun dalam jangka panjang, yang diperoleh dari rata-rata perubahan dari waktu ke waktu. Analisis data penelitian ini dilaksanakan secara komprehensif karena menggunakan *time series* dan melakukan periode pengamatan dengan rentang waktu sepuluh tahun, serta fokus subjek penelitian hanya pada satu daerah.

4. Melakukan analisis dengan penelitian tentang kinerja keuangan pemerintah daerah pada pemerintah daerah lain di Indonesia.